

PENGARAHAN
PADA ACARA RAPAT KERJA NASIONAL
PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2012
Kementerian Pertanian, 11 Januari 2012

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Yang terhormat,

- ***Sdr. Wakil Menteri Pertanian,***
- ***Sdr. Para Pejabat Eselon I dan II Lingkup Kementerian Pertanian,***
- ***Sdr. Para Kepala Dinas dan Badan Lingkup Pertanian Provinsi dari Seluruh Indonesia, serta***
- ***Hadirin Sekalian yang Berbahagia.***

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini bersama-sama kita dapat menghadiri

acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2012 yang secara resmi telah dibuka Bapak Wakil Presiden RI. Acara ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan pada setiap awal tahun dan merupakan wahana untuk mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan sepanjang tahun 2011 yang lalu serta melakukan berbagai langkah perbaikan dan percepatan pelaksanaan rencana kerja pembangunan pertanian tahun 2012.

Hadirin peserta Rakernas yang terhormat,

Mengawali pengarahan saya, perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada seluruh kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi beserta seluruh jajarannya termasuk jajaran Pertanian di Kabupaten/Kota, atas kinerja, dukungan dan partisipasi aktifnya dalam menyukseskan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dalam tahun 2011 yang lalu. Dari sisi penyerapan anggaran capaiannya relatif sama dengan tahun yang lalu. Secara makro kinerja

pertanian juga lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian seperti yang telah saya laporkan kepada Bapak Wakil Presiden, dari sisi produksi capaiannya masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan, mengingat dampak perubahan iklim yang tidak terhindarkan sehingga berakibat pada terjadinya pergeseran pola tanam, di samping terjadinya banjir dan kekeringan serta eksplosif hama dan penyakit tanaman. Investasi pemerintah tahun 2011 mencapai Rp. 17,6 triliun, akan tetapi dampak peningkatan produksi tidak *significant*, hal ini berarti efektifitas program belum optimal. Kemungkinan ada persoalan tata-kelola dan belum sinergi keterpaduan antar program dan antar kegiatan di wilayah.

Saudara-Saudara peserta Rakernas,

Menindaklanjuti arahan Bapak Wakil Presiden R.I., jika kita cermati capaian produksi berbagai komoditas prioritas, secara umum capaiannya mengalami sedikit penurunan. Produksi komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedele pada tahun 2011 berdasarkan angka ramalan III

(ARAM III) BPS untuk produksi padi sekitar 65,39 juta ton gabah kering giling (GKG), lebih rendah 1,63% dibandingkan dengan produksi 2010. Untuk jagung sebesar 17,2 juta ton pipilan kering, atau 5,99% lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, sedangkan produksi kedele sebesar 870 ribu ton biji kering, atau 4,08% lebih rendah dibanding produksi tahun 2010.

Untuk capaian di bidang perkebunan, khususnya produksi tebu dalam rangka pencapaian swasembada gula, sampai akhir tahun 2011 luas areal tebu mencakup 447,3 ribu hektar dengan capaian produksi sebesar 2,23 juta ton atau 82,59% dari target yang telah ditetapkan.

Terkait dengan pencapaian swasembada daging, pada tahun 2011 telah diselesaikan salah satu langkah strategis yaitu dengan telah dilaksanakannya sensus ternak sebagai dasar acuan penting dalam pengambilan kebijakan program swasembada daging. Berdasarkan sensus tersebut populasi sapi ternak sapi Indonesia mencapai 15,4 juta ekor dan kerbau sebanyak 1,3

juta ekor. Kondisi ini menunjukkan ketersediaan populasi ternak meningkat sehingga ketergantungan terhadap impor ternak dan daging dapat lebih diperkecil. Capaian produksi daging lokal tahun 2011 mencapai 292,45 ribu ton, meningkat cukup tajam dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 195,82 ribu ton. Peningkatan produksi ini mampu mengurangi proporsi daging impor dari semula 53% terhadap total konsumsi daging sapi nasional menjadi 34,9%.

Kita menyadari bahwa berbagai upaya telah kita tingkatkan pada tahun 2011, namun angka-angka produksi tersebut memberikan signal bahwa kualitas pelaksanaan kegiatan belum memuaskan. Masih sering kita dengar masalah keterlambatan penyaluran benih, pupuk bersubsidi yang sulit diperoleh, lambatnya pengendalian OPT, penyuluhan yang belum berjalan baik dan sebagainya. Mengutip arahan Bapak Presiden agar dalam melaksanakan kegiatan tidak lagi secara "*business as usual*" harus ada percepatan pelaksanaan program dan anggaran. Setiap Kepala Dinas Pertanian / Badan / SKPD di daerah dituntut untuk menguasai kondisi

lapangan yang ada di wilayahnya, sehingga berbagai kondisi dan masalah petani cepat teratasi, sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi petani dapat segera kita bantu.

Terkait dengan pencapaian Surplus beras 10 juta ton yang semula ditargetkan tahun 2015 dimajukan menjadi tahun 2014. Sebagai konsekuensinya pada tahun 2012 target yang ditetapkan adalah sebesar sebesar 72,02 juta ton GKG atau meningkat 10,1 % dibandingkan capaian tahun 2011. Saya menyadari untuk dapat mencapai target tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, terutama mengantisipasi pengaruh perubahan iklim. Untuk itu saya minta kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian baik di Pusat dan Daerah untuk benar-benar dapat mengidentifikasi dan memetakan dengan baik potensi dan permasalahan di wilayahnya. Untuk mengatasi persoalan-persoalan lapangan, saudara-saudara tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Perlu keterpaduan antar unit kerja, perlu sinergi dan kebersamaan dalam melaksanakan semua kegiatan. Perbanyak dan tingkatkan intensitas

pertemuan di lapangan dengan koordinasi dengan instansi/SKPD terkait. Bukan justru sebaliknya, adanya egoisme instansi masing-masing dan tidak mau saling membantu.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Pencapaian swasembada pangan tidak dapat hanya dilakukan melalui upaya pencapaian peningkatan produksi, tetapi seiring dengan program itu dilaksanakan upaya-upaya dalam mengurangi konsumsi beras dan mengembangkan pola pangan yang beragam, bergizi dan berimbang. Untuk itu program diversifikasi pangan dan gizi juga harus sukses. Program ini sangat strategis mengingat dapat mengurangi asupan beras dikonsumsi disertai dengan peningkatan kualitas asupan, sehingga akan lebih mempercepat terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Upaya untuk mengurangi ketergantungan pangan pada gandum kita telah mencanangkan kemandirian tepung nasional, kita diharapkan mampu mensubstitusi tepung impor secara bertahap.

Di samping aspek produksi dan konsumsi, kita dituntut untuk meningkatkan daya saing produk pertanian kita. Merebaknya impor produk pangan baik komoditi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan telah menjadi sorotan masyarakat. Banyaknya ragam komoditas pertanian yang masuk ke Indonesia menunjukkan lemahnya daya saing produk pertanian kita dibandingkan dengan produk impor. Komoditi perkebunan yang saat ini menjadi andalan ekspor perlu kita tingkatkan mutu dan kualitasnya. Pengendalian standar mutu dan persyaratan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) harus kita kembangkan dan kita suluhkan kepada para petani. Kerjasama kemitraan dengan para pelaku usaha, eksportir dan para pemasok pasar modern agar produk petani dapat memperoleh akses pasar yang lebih mudah dan lebih baik ke pasar-pasar modern. Upaya pengketatan pengawasan terhadap produk-produk pertanian impor juga terus ditingkatkan. Saya bulan lalu telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur pembatasan pintu masuk impor komoditas hortikultura hanya menjadi 4 pintu masuk. Demikian

pula terhadap pengawasan cemaran pestisida pada produk segar asal tumbuhan juga semakin diperketat. Kebijakan ini untuk memberikan peluang pengembangan hortikultura di dalam negeri. Namun demikian upaya-upaya tersebut harus diimbangi dan ditindaklanjuti dengan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanian di dalam negeri.

Saudara-saudara sekalian,

Salah satu aspek penting untuk ditindaklanjuti adalah masalah pelayanan permodalan. Pemerintah telah meluncurkan berbagai skim kredit program, tetapi kenyataannya tingkat serapannya relatif masih rendah dengan kisaran 4,7%-18,1%. Saya harapkan saudara-saudara Kepala Dinas/Kepala Badan di tingkat Provinsi agar memberikan perhatian terhadap capaian penyerapan kredit program ini. Diperlukan langkah-langkah koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak terutama perbankan agar capaian serapannya dapat ditingkatkan.

Di samping itu sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden R.I. bahwa pemerintah telah menetapkan koridor percepatan pembangunan yang sebagian besar berbasis pada pembangunan pertanian. *Master Plan* Percepatan Pembangunan ini perlu ditindaklanjuti dengan mengisi program dan kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan di setiap koridor. Kaitkan pembangunan koridor ini dengan membangun kawasan berbasis komoditas unggulan dalam bentuk *cluster-cluster* pertanian berskala luas. Pengembangan kawasan tidak hanya mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah tetapi juga harus mempertimbangkan aspek strategis wilayah, tata ruang dan sosial ekonomi serta arah pengembangan komoditas. Pengembangan kawasan tersebut akan dilakukan secara *multi years*, sehingga pengembangan kawasan memberikan kontribusi secara nyata terhadap pembangunan koridor ekonomi.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Pemerintah telah membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran yang akan mengevaluasi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga secara periodik dan hasilnya akan dilaporkan kepada Bapak Presiden. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan instruksi Bapak Presiden untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan program dan serapan anggaran, yaitu :

- (1) Segera atasi kemungkinan adanya regulasi yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan (maksimal 3 bulan);
- (2) Pimpinan unit kerja agar melaksanakan pengendalian langsung terhadap pelaksanaan program/ kegiatan/ anggaran;
- (3) Pastikan bahwa realisasi anggaran lebih cepat, tidak seperti pola tahun lalu;
- (4) Perkembangan pelaksanaan anggaran/program akan dipantau setiap 3 bulan, yaitu bulan April, Agustus dan Nopember; dan
- (5) Berikan sanksi terhadap instansi yang kinerjanya lambat.

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden R.I. tersebut maka dalam pencapaian sasaran-sasaran program dan kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2012, saya meminta kepada seluruh jajaran Eselon I dan Dinas/Badan lingkup Pertanian di tingkat Provinsi melakukan langkah-langkah perbaikan pengelolaan pembangunan pertanian sebagai berikut :

1. Pedoman Umum (Pedum) dan Petunjuk Teknis (Juknis) harus sudah di terbitkan pada minggu pertama bulan Januari 2012 dan paling lambat akhir Januari 2012. Pedum dan Juknis tersebut harus sudah diterima oleh KPA satuan kerja baik di Pusat, UPT pusat yang ada di daerah, provinsi, dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untuk itu para pimpinan SKPD diminta proaktif dalam penyampaian dan sosialisasi pedoman dimaksud.
2. Revisi DIPA 2012 yang bersifat administratif harus sudah selesai paling lambat pada bulan Januari 2012, sedangkan revisi kegiatan atau komponen kegiatan paling lambat diselesaikan pada bulan Pebruari 2012

3. Susun rencana penyerapan anggaran dengan cermat dan hindari penumpukan serapan anggaran di kuartal IV. Realisasi anggaran di triwulan I ditargetkan minimal 20%, triwulan II 40%, triwulan III 70%.
4. Laporkan perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan SKPD pada bulan Maret, Juli dan Oktober.
5. Kegiatan-kegiatan pokok, termasuk kegiatan yang masuk dalam belanja sosial agar dilaksanakan lebih awal, terutama CP/CL harus sudah dapat diselesaikan pada awal Pebruari, sehingga kegiatan secara keseluruhan penyelesaiannya dapat dimajukan pada bulan Juli-Agustus
6. Terkait peraturan-peraturan yang menghambat dan peraturan-peraturan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program harus selesai paling lambat pada bulan Pebruari 2012.
7. Kegiatan-kegiatan yang masuk dalam pos belanja modal, yang pelaksanaannya melalui pola kontraktual, agar penandatanganan kontrak

dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Maret 2012.

8. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa di setiap unit kerja agar dapat dibentuk selambat-lambatnya tanggal 3 Januari 2012, pengumuman pelelangan pengadaan barang dan jasa paling lambat tanggal 16 Januari 2012 serta seluruh proses pelelangan dilakukan melalui mekanisme *electronic procurement (e-procurement)*
9. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus melakukan pengendalian langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara efektif.
10. Inspektorat Jenderal akan melakukan pengawasan dan pengawalan kegiatan tidak hanya saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan tetapi mulai dari perencanaan operasional.
11. Setiap pimpinan SKPD agar meneruskan Instruksi ini kepada satker-satker di daerah/ UPT/Kabupaten/Kota dan mengawasi

penugasan ini serta melaporkan sesuai dengan ketentuan waktu tersebut.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Melalui instruksi yang saya sampaikan tadi saya berharap adanya peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Tugas yang Saudara-saudara emban adalah amanah dan tidaklah ringan, oleh sebab itu perlu kerja keras. Namun saya percaya dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi dari seluruh jajaran pelaksana baik di Pusat maupun di Daerah, kita Insya Allah akan mampu mewujudkan harapan-harapan rakyat. Selamat bekerja.

Billahitaufik walhidayah, wassalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakatuh.

Menteri Pertanian

Suswono